

# Rancangan Model Pembiayaan Kredit Pertanian Berbasis Tanaman (*on The Plant Basis*) untuk Komoditas Buah-buahan

Muhammad Firdaus dan Yayah K. Wagiono

## Tantangan Industri Buah Nasional terkait Krisis Ekonomi Global

Sampai awal tahun 2009, krisis keuangan yang bermula di Amerika Serikat sudah berubah menjadi krisis global. Beberapa pengamat ekonomi menyatakan Asia merupakan wilayah yang akan terkena dampak paling parah, karena kontributor terbesar bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia adalah ekspor, yang tujuan utamanya adalah Amerika Serikat dan Eropa. Dari satu sisi, ini menuntut Indonesia untuk mampu melakukan penetrasi ke tujuan pasar internasional baru. Di sisi lain, dengan ukuran pasar domestik yang sangat besar, Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi masuknya barang-barang impor. Salah satu cara yang terbaik dalam menghadapi tantangan ini adalah meningkatkan daya saing produk baik di pasar domestik maupun untuk tujuan pasar internasional. Komoditas yang masih berpotensi besar untuk ditingkatkan daya saingnya adalah hortikultura, khususnya buah-buahan.

Dari sudut pandang peluang pasar internasional, ekspor komoditas buah-buahan di pasar dunia tergolong pada kelompok *high growth* dengan laju pertumbuhan 11 persen (FAO, 2009). Hal ini berkaitan dengan meningkatnya kesadaran akan keseimbangan konsumsi, peningkatan populasi dunia serta meningkatnya GDP negara-negara dengan populasi tinggi. Peluang ini perlu dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia yang memiliki keunggulan kompetitif dalam bidang buah tropika dalam hal tingginya keragaman genetik dan kesesuaian agroklimat.

Rancangan Model Pembiayaan Kredit Pertanian Berbasis Tanaman  
(*on The Plant Basis*) untuk Komoditas Buah-buahan

Dari sisi dalam negeri, Berdasarkan data Dirjen Hortikultura Departemen Pertanian (2009), neraca perdagangan buah Indonesia masih negatif. Volume ekspor buah pada tahun 2008 sekitar 324 ribu ton dengan nilai lebih dari US \$ 234 juta. Pada tahun yang sama, masyarakat Indonesia mengkonsumsi buah dari luar negeri sebesar 502 ribu ton dengan nilai impor lebih dari US \$ 474 juta. Hal ini terjadi antara lain karena sejak tahun 1970-an negara-negara produsen buah dunia seperti Thailand, China, Brazil dan negara Amerika latin lainnya terus meningkatkan kapasitas daya saingnya melalui pendekatan *knowledge driven*. Di dalam negeri, upaya khusus untuk meningkatkan daya saing industri buah baru dilakukan oleh Kementerian Riset dan Teknologi sejak tahun 2000 dengan mencanangkan kegiatan Riset Unggulan Strategis Nasional Pengembangan Buah-Buahan Unggulan Indonesia (RUSNAS buah) dengan misi untuk mengembangkan teknologi guna sehingga dapat menggerakkan agribisnis buah nasional, yang masih bejalan sampai tahun 2009. Peningkatan daya saing buah nasional dilaksanakan melalui pengembangan varietas unggul dan teknologi untuk menghasilkan buah berkualitas serta membangun suatu sistem riset dan pengembangan jaringan kerjasama strategis yang mendukung agribisnis buah-buahan Indonesia melalui koordinasi dan penyatuan sumberdaya.

Relevansi pengembangan industri buah nasional terkait langsung dengan arah pencapaian masyarakat yang lebih makmur dan berkeadilan (*prosperity* dan *justice*). Buah berpotensi besar untuk dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan dan pertumbuhan baru, terutama melalui pengembangan industri kerakyatan. Industri buah yang kuat juga dapat mendukung ketahanan pangan nasional, karena konsumsi buah secara langsung meningkatkan asupan gizi dan potensi yang besar untuk mengembangkan produk olahan buah bagi daerah rawan bencana. Selain itu pengembangan buah dapat bernilai ekologis. Berbagai jenis buah merupakan tanaman keras yang berumur panjang, yang keberadaannya signifikan dalam menjaga kualitas lingkungan.

Pengembangan industri buah dalam mendukung sektor pertanian di Indonesia saat ini mengalami masalah utama yaitu

kekurangan suplai yang berkualitas dan tersedia secara kontinu (*supply side problem*), baik untuk pemenuhan pasar domestik maupun pasar luar negeri. Dengan demikian upaya dari berbagai sudut pandang termasuk ekonomi diperlukan untuk memecahkan permasalahan ini, karena pendekatan suplai dalam kebijakan ekonomi sering diabaikan.

Salah satu penyebab kurangnya suplai buah di Indonesia adalah ketersediaan lahan per kapita yang semakin menyempit. Hal ini diindikasikan dengan semakin meningkatnya permintaan lahan untuk kebutuhan non pertanian yang menyebabkan luas sawah berkurang hingga 140 ribu hektar per tahun (Irawan, 2005). Namun demikian, pengembangan buah-buahan di Indonesia masih dapat dilakukan karena sebagian besar pengembangan buah-buahan tersebut dilakukan secara terpecah di lahan-lahan sempit di sekitar area pemukiman.

Penyebab lain kurang berkembangnya industri buah dalam negeri adalah kurang terintegrasinya berbagai aktivitas mulai dari produksi, pengepakan sampai distribusi ke pasar modern dan tradisional. Hal ini terjadi karena tidak tercapainya skala produksi yang cukup untuk mencapai *economies of scale* (penghematan karena skala). Dengan karakteristik masa produksi yang relatif lambat dibandingkan komoditas lain, menyebabkan sumber pembiayaan untuk pengusaha buah terbatas. Terobosan pemikiran diperlukan untuk menjawab tantangan ini.

#### Model Alternatif Pembiayaan Berbasis Tanaman: Solusi Alternatif

Strategi untuk mengembangkan komoditas pertanian dalam mendukung pembangunan regional (desa maupun kota) dengan fokus komoditi dipelopori antara lain oleh Jepang dengan meluncurkan program *one village one product* (OVOP) pada tahun 1979 untuk Orta Perfecture. Program ini dijalankan dengan berdasarkan tiga prinsip utama yaitu *thinking globally while acting locally, independence and creativity* dan *fostering*

*human resources*" (Chimudu, 2007). Sukses program ini diikuti oleh beberapa negara tetangga dengan meluncurkan program serupa seperti di Thailand dengan program *one tambon one product* (OTOP) yang diluncurkan oleh PM Dr. Shinawatra Thaksin pada tahun 2001 (Routray, 2007), utamanya untuk komoditas hortikultura. Di Malaysia, terinspirasi oleh program tersebut, diterapkan *one district one industry* (ODOI), dengan fokus membangun jiwa kewirausahaan masyarakat pedesaan.

Di Indonesia, program pengembangan komoditas pertanian di atas diadopsi dengan nama OVOP seperti di Jepang. Beberapa contoh penerapan program ini misalnya untuk pengembangan sayur-sayuran di Cianjur dan Boyolali, yang setelah dievaluasi disimpulkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan (Dipta, 2009). Pada tahun-tahun terakhir program ini lebih banyak di bawah kendali Kementerian Koperasi dan UKM. Bahkan Mennegkop dan UKM, Suryadharma Ali sendiri mengatakan OVOP merupakan strategi untuk menghadapi krisis keuangan global, karena desa mempunyai potensi yang besar namun masih menjadi pusat kemiskinan dan pengangguran (Ali, 2008).

Program OVOP yang diterapkan di atas merupakan suatu pendekatan yang baik, karena bila dilakukan akan dapat meningkatkan pencapaian *economies of scale*. Masih terdapat celah utama dari program ini, yaitu masalah pembiayaan untuk menjalankan program yang masih lebih banyak ditanggung oleh pemerintah. Dengan kondisi anggaran yang semakin ketat seperti saat ini, upaya *self-financing* hendaknya yang lebih diutamakan, sehingga pemerintah dapat lebih fokus dalam memanfaatkan anggaran, seperti untuk pembangunan infrastruktur. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa masalah pembiayaan pertanian sering dihadapi permasalahan koleteral. Selain itu dalam program ini masih dijalankan dengan basis lahan hamparan, yang semakin sulit dilakukan dengan ketersediaan lahan yang semakin menyempit. Yang lebih utama lagi pelaksanaan pengembangan komoditas yang sama pada satu hamparan yang luas akan dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekologis, seperti semakin besarnya ancaman serangan hama dan penyakit.

Berangkat dari pemikiran tersebut, sebenarnya potensi pengembangan pertanian khususnya buah di Indonesia masih dapat dilakukan, meskipun dilakukan secara terpecah di lahan-lahan sempit di sekitar area pemukiman. Walaupun terpecah dan masing-masing hanya berupa lahan sempit, tetapi bila dikompilasi jumlah lahan yang potensial untuk pengembangan tanaman buah menjadi sangat luas. Dengan kondisi lahan seperti ini muncul permasalahan lain yaitu terhambatnya realisasi pembiayaan melalui kredit program pertanian. Realisasi pembiayaan melalui kredit program selama ini selalu terganjal oleh kendala kepemilikan lahan atau bahkan adanya persyaratan sertifikat kepemilikan lahan. Untuk mengatasi hal tersebut sudah ditempuh alternatif pengajuan kredit yang diajukan secara kelompok. Alternatif ini baru berjalan baik untuk komoditas tanaman pangan seperti padi dimana lahan milik kelompok terdapat dalam satu hamparan. Jadi yang menjadi permasalahan adalah adanya ketersediaan lahan yang terpecah dan berada di sekitar pemukiman penduduk, namun bila dijumlahkan cukup potensial untuk pengembangan buah-buahan.

Permasalahan di atas dapat dijawab antara lain dengan alternatif model pembiayaan bagi penanaman tanaman buah yang tidak mengkaitkan dengan kepemilikan lahan yang harus berada dalam satu hamparan. Alternatif model pembiayaan tersebut dapat berupa model pengajuan kredit oleh petani kepada lembaga penjaminan kredit untuk pengembangan tanaman buah berdasarkan kepemilikan jumlah tanaman produktif dan tidak berdasarkan luasan lahan, atau yang disebut model pembiayaan *on the plant basis*. Model pengajuan kredit ini dilakukan secara kelompok. Penjaminan kredit atau *avalis* dilakukan oleh distributor swasta yang membuat kontrak dengan kelompok pekebun atau petani hortikultura. Terdapat minimal tiga faktor kunci untuk menjalankan model pemberdayaan petani hortikultura. Pertama adalah ketersediaan benih/bibit yang mutunya terjamin. Kedua, pengawasan terhadap teknologi produksi mulai penyemaian benih sampai penanganan panen dan pasca panen. Kemudian, faktor ketiga adalah tersedianya jaminan pasar.

Dengan ide di atas, permasalahan terbatasnya dana yang dimiliki petani untuk melakukan budidaya buah secara baik dapat diatasi. Karena *avalis* akan berkepentingan untuk mendapatkan produk dengan kualitas yang baik, yang tentunya dihasilkan dengan penerapan budidaya yang baik pula. Tanpa adanya pinjaman dana, maka para petani hanya dapat mengusahakan buah-buahan tanpa disertai teknik produksi dan penanganan pasca panen yang tepat. Teknik penanaman yang terkesan apa adanya ini hanya mampu menghasilkan buah dengan kualitas dan kuantitas yang rendah serta sebagian besar tidak sesuai dengan preferensi konsumen. Oleh sebab itu, ketersediaan kredit pertanian berbasis tanaman adalah sangat diperlukan terutama untuk membantu petani kecil agar lebih akses terhadap sumber dana yang akan digunakan untuk pengeluaran biaya-biaya produksinya.

Hasil akhir yang diharapkan dari model ini antara lain adalah memperkuat peran serta petani dalam menjalankan perekonomian daerah melalui sektor pertanian. Selain itu, peningkatan peran serta kelembagaan di tingkat petani diharapkan dapat menjadi suatu rangkaian *Supply Chain Management* (SCM) yang kuat dan berperan penting dalam penyediaan komoditas hortikultura nasional dalam memenuhi kebutuhan konsumen, baik konsumen lokal maupun mancanegara. Dengan demikian akan diperoleh peningkatan suplai komoditas hortikultura nasional yang sesuai dengan preferensi pasar dan mampu bersaing di pasar dunia, sehingga secara ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya para petani tanaman buah. Melalui peningkatan pendapatan ini diharapkan tingkat kesejahteraan petani pun semakin meningkat sehingga dapat mencapai kualitas hidup yang lebih baik lagi.

#### Rancangan Model Pembiayaan Berbasis Tanaman: Kasus Pisang

Model pembiayaan kredit pertanian *on the plant basis* yang dapat dijalankan berangkat dari beberapa asumsi sebagai berikut:



1. Terjadi kekurangan suplai buah yang berkualitas, baik untuk pemenuhan pasar domestik maupun pasar luar negeri.
2. Model dikembangkan berdasarkan ketersediaan sumberdaya lahan, sumberdaya manusia, sumberdaya permodalan, sumberdaya pemasaran, dan sumberdaya teknologi.

Berdasarkan asumsi di atas, kemudian model akan disusun berdasarkan pola INTI-PLASMA karena inti yang berperan sebagai distributor sangat diperlukan guna menjadi *avalis* untuk mendapatkan kredit dari perbankan. Penyaluran kredit oleh inti dalam bentuk natura, yaitu benih/bibit, pupuk dan pestisida. Pengembalian kredit oleh plasma juga dalam bentuk natura. Sebagai contoh dari dua tandan pisang yang dipanen dari satu pohon, satu buah dijual plasma ke inti kemudian sisanya diserahkan sebagai bentuk angsuran kredit petani.

Dalam pelaksanaan model di atas, terdapat beberapa institusi yang terlibat antara lain pemerintah daerah di masing-masing kabupaten atau kota lokasi program, perguruan tinggi serta pihak swasta. Peran masing-masing institusi yang terlibat adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah merupakan pihak utama dan terpenting dalam pengembangan model *on the plant basis* terutama pada era otonomi daerah. Pemerintah daerah dapat saja berperan sebagai penyedia dana untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan selama program berjalan
2. Perguruan tinggi berperan sebagai *technical support* yang menyediakan teknologi dan konsultasi teknis selama program berjalan.
3. Pihak swasta berperan sebagai *avalis* untuk penjaminan kredit dari perbankan, juga berperan sebagai penampung produk-produk yang dihasilkan petani.

Dalam tulisan ini, diambil contoh kasus penerapan model untuk pengembangan komoditas pisang. Hal ini dilakukan untuk

mengetahui dampak ekonomi bila model ini diterapkan. Secara lebih rinci terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukannya untuk menerapkan model *on the plant basis* ini di lapangan, yaitu:

- a. Penentuan lokasi terpilih berdasarkan potensi pengembangan komoditas dari sisi ketersediaan lahan pekarangan dan kebun untuk penanaman serta kemauan petani untuk berpartisipasi secara aktif dalam penerapan model
- b. Melakukan survei kepada petani-petani yang berada di lokasi terpilih, untuk mengetahui tingkat kemauan petani yang akan berpartisipasi secara aktif dalam model pembiayaan kredit pertanian *on the plant basis*.
- c. Melakukan survei atau wawancara kepada *avalis* atau distributor swasta yang berperan sebagai penjamin kredit pertanian berbasis tanaman. Hal ini terutama untuk menjawab seberapa besar kesediaan *avalis* untuk menanggung risiko apabila terjadi kemacetan dalam angsuran pembayaran kredit oleh petani.
- d. Pembentukan kelompok petani yang dapat dihitung berdasarkan jumlah tanaman yang ada. Misalnya bila jumlah seluruh populasi tanaman pisang pada luasan lahan 50 ha adalah 60.000 tanaman, dan setiap petani akan bertanggung jawab terhadap 50 tanaman pisang, maka jumlah petani yang akan dilibatkan dalam kegiatan sebanyak 1.200 petani.
- e. Pelaksanaan program dapat dilakukan secara bertahap. Bibit pisang yang akan dikembangkan oleh petani pada tahun pertama selanjutnya akan digunakan untuk pengembangan pisang pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan anakan yang diperoleh dari bibit pisang yang ditanam pada tahun pertama. Dengan demikian, kegiatan pengembangan pisang dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkesinambungan
- f. Pendampingan beberapa kelompok tanaman oleh satu penyuluh yang wilayah kerjanya terdiri atas beberapa kelompok tani yang sudah ada di tingkat desa dan satu pendamping yang bertugas sebagai *technical assistance*.

Perhitungan dampak ekonomi secara sederhana bila model diterapkan dapat menggunakan contoh sebagai berikut. Perhitungan dilakukan untuk setiap tanaman pisang yang dibudidayakan petani. Pada tahun pertama jumlah pengeluaran untuk setiap tanaman sebesar Rp 17.550, mencakup terutama untuk pembelian bibit dan pupuk. Pada tahun pertama pula akan sudah akan diperoleh penerimaan sebesar Rp 24.000 yang berasal dari penjualan satu tandan pisang dan 3 bibit dari anakan (jumlah bibit ini adalah minimum). Pada tahun kedua dan ketiga jumlah pengeluaran masing-masing tahun sebesar Rp 32.350 dan Rp 13.050. Penerimaan tahun kedua dan ketiga masing-masing tahun berasal dari dua tandan pisang dan enam bibit dari anakan sejumlah Rp 48.000 untuk setiap tahunnya. Dengan demikian untuk setiap bibit pisang yang ditanam oleh petani akan diperoleh penerimaan bersih setelah didiskonto dengan suku bunga 10 persen sebesar Rp 50.500 selama periode tiga tahun. Arus ekonomi selama tiga tahun ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Arus Ekonomi Selama Tiga Tahun Kegiatan per Tanaman Pisang

| Th  | Penerimaan                      |      |         | Pengeluaran |
|-----|---------------------------------|------|---------|-------------|
|     | Sumber                          | Unit | Nilai   | Nilai       |
| I   | Bibit                           | 2    | 9.000   | 17.550      |
|     | Buah pisang                     | 1    | 15.000  |             |
| II  | Bibit                           | 6    | 18.000  | 32.350      |
|     | Buah pisang                     | 2    | 30.000  |             |
| III | Bibit                           | 6    | 18.000  | 13.050      |
|     | Buah Pisang                     | 2    | 30.000  |             |
|     | Total I, II, III                |      | 120.000 | 62.950      |
|     | Pendapatan                      |      |         | 57.050      |
|     | Pendapatan setelah diskonto 10% |      |         | 50.500      |

## Penutup

Berbagai upaya harus dilakukan oleh segenap pelaku ekonomi dan masyarakat untuk menghadapi tantangan krisis ekonomi global. Sektor pertanian menghadapi permasalahan utama yaitu *supply side*: kuantitas yang cukup secara kontinu, kualitas dan konsistensi produk. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menggerakkan mata rantai pasokan yang memenuhi skala produksi yang mencapai *economies of scale*, dengan mengintegrasikan aktivitas produksi dan distribusi sampai ke pasar modern, tradisional dan luar negeri.

Model kredit *on the plant basis* merupakan salah satu alternatif model pembiayaan untuk mengatasi masalah semakin terbatasnya ketersediaan lahan sekaligus dapat menggerakkan mata rantai pasokan (*supply chain management*). Perhitungan kelayakan model menunjukkan besarnya potensi ekonomi yang dapat ditimbulkan. Dengan contoh komoditas pisang, bila selama tiga tahun dapat dikembangkan sebanyak 60.000 tanaman yang setara dengan luasan 50 hektar, akan diperoleh pendapatan bersih sekitar 3 milyar rupiah yang akan didistribusikan kepada 1.200 petani. Besaran ini merupakan dampak langsung, tentunya bila dihitung efek berganda dari penerimaan pendapatan bersih tersebut, nilai ekonominya akan jauh lebih besar karena sebagian besar pendapatan yang diperoleh petani akan digunakan untuk kegiatan konsumsi. Terlebih bila model diterapkan untuk banyak lokasi, karena contoh tersebut baru untuk jumlah petani di satu desa.

## Daftar Pustaka

- Ali, S. 2008. Program OVOP Hadapi Krisis Keuangan Global. Madina edisi 8-14 Desember.
- Chimudu, J. I. 2007. The Impact of One Village One Product (OVOP) on Household Income Implications on Food Security: The Case of Bvumbwe Operation Area, Thyolo District, Malawi. Thesis. Egerton University.

- Dipta, W. 2009. OVOP Terbukti Tingkatkan Pendapatan Daerah. Publikasi di Internet dari Harian Ekonomi Neraca.
- Dirjen Hortikulura Departemen Pertanian. 2009. Statistik Ekspor dan Impor Buah Indonesia.
- FAOSTAT. 2009. Export and Import Quantity and Value of Fruits.
- Irawan, B. 2005. Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya dan Faktor Determinan. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 23 No. 1.
- Pusat Kajian Buah Tropika (PKBT). 2008. Laporan Akhir Penelitian Riset Unggulan Strategi Nasional Buah Unggulan. Pusat Kajian Buah Tropika, Institut Pertanian Bogor.
- Routray, J. K. 2007. One Village One Product: Strategy for Rural Sustainable Development in Thailand. Cab Calling edisi January-March.